

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI
DESA SUKOHARJO II KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN PRINGSEWU**

(Skripsi)

**Oleh
Kukuh Bagus Wijanarko
NPM.1913032025**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SUKOHARJO II KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

KUKUH BAGUS WIJANARKO

Penelitian bertujuan menjelaskan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian masyarakat Desa Sukoharjo II. Sampel penelitian berjumlah 96 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik utama yaitu angket dan teknik pendukung yaitu wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yaitu faktor usia sebanyak 52,08%, faktor tingkat pendidikan sebanyak 46,87%, faktor pekerjaan sebanyak 59,37%, faktor jenis kelamin sebanyak 47,91%, faktor kepemimpinan pemerintah desa sebanyak 43,75% dan faktor komunikasi sebanyak 53,12%. Berdasarkan hasil penelitian terhadap keenam faktor tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mendominasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah faktor pekerjaan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

FACTORS THAT INFLUENCE COMUNITY PARTICIPATION IN MANAGING VILLAGE FUNDS IN SUKOHARJO II VILLAGE SUKOHARJO SUB-DISTRICT PRINGSEWU DISTRICT

by :

KUKUH BAGUS WIJANARKO

This study aims to explain and describe the factors that influence community participation in managing village funds in Sukoharjo II Village, Sukoharjo District, Pringsewu Regency. The research method uses a descriptive method with a quantitative approach. The research subjects of the people of Sukoharjo Village II. The research sample is 96 respondents. Data collection techniques using the main technique, namely questionnaires and supporting techniques, namely interviews. The results showed that the factors influencing community participation in managing village funds were age 52.08%, education level 46.87%, occupation 59.37%, gender 47.91%, the village government leadership factor is 43.75% and the communication factor is 53.12%. Based on the results of research on these six factors, it can be concluded that the factor that most dominates community participation in managing village funds is the employment factor.

Keywords : Society Participation and Management of Village Funds

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI
DESA SUKOHARJO II KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN PRINGSEWU**

Oleh

Kukuh Bagus Wijanarko

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi PPKn**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu**

Nama Mahasiswa : **Kukuh Bagus Wijanarko**

NPM : **1913032025**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

Yunisa Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

Pembimbing II,

Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.
NIP 231601840309101

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003

Ketua Program Studi
Pendidikan PKn

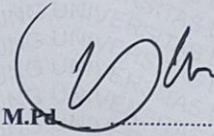
Yunisa Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

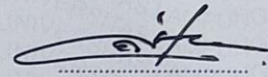
Ketua

: Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.



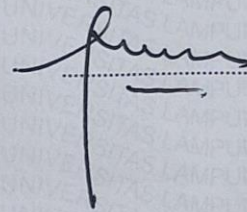
Sekretaris

: Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.



Penguji
Bukan Pembimbing

: Drs. Berchah Pitoewas, M.H.



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

~~Prof. Dr. Sunyono, M.Si.~~
NIP. 19651230 199111 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 07 November 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Kukuh Bagus Wijanarko
NPM : 1913032025
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Taniran, Sukoharjo II, Kecamatan Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 20 November 2023



Kukuh Bagus Wijanarko

NPM 1913032025

RIWAYAT HIDUP



Kukuh Bagus Wijanarko merupakan nama penulis. Penulis dilahirkan di Sukoharjo II, Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu pada tanggal 28 Maret 2001. Anak ke empat dari empat bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Sigit Puji Astowo, dan Ibu Siti Komariyah.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak di TK Islamiyah Sukoharjo II yang diselesaikan pada tahun 2007. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sukoharjo II (lulus pada tahun 2013), melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Sukoharjo (lulus pada tahun 2016) dan melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 2 Pringsewu (lulus pada tahun 2019). tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Bandar Lampung dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama kuliah, penulis pernah menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS (HIMAPIS), dan Anggota Forum Pendidikan Kewarganegaraan (FORDIKA).

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Yogyakarta-Bandung-Jakarta Tahun 2022, melaksanakan salah satu mata kuliah wajib yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Bandungbaru Kec. Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Dan penulis melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SD Negeri 2 Bandungbaru.

MOTTO

“Orang-orang boleh jadi tidak menghargaimu, tetapi kamu jangan sampai tidak menghargai dirimu sendiri. Semua yang terjadi di hidupmu adalah bagian perjuangan terbaikmu”

(Kukuh Bagus Wijanarko)

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho dan berkah dari Allah SWT, penulis mengucapkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT limpahkan sehingga penulis dapat mempersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan cinta kepada:

“Kedua orang tuaku, Bapak Sigit Puji Astowo dan Ibu Siti Komariyah, S,Pd. yang aku sayangi dan aku cintai. Yang selalu menjadi alasan terbesarku untuk berjuang, yang selalu menyayangi tanpa tapi, mendoakan dengan setulus hati, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan. Terima kasih telah merawatku dan menjaga ku dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tulus. Aku memohon maaf karna aku belum bisa menjadi seseorang yang hebat, tetapi aku selalu berusaha untuk membuat kalian tersenyum bangga melihatku dan tak lupa pula aku selalu berdoa agar bapak dan Ibu sehat selalu, dan diberi umur yang panjang. Bapak dan Ibu toga dan gelar dibelakang namaku tidak akan ada jika tanpa jeri payah kalian.”

Serta

“Almamaterku Tercinta Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang sangat berlimpah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu”**. Skripsi ini dibuat sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Pada kesempatan kali ini penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd. selaku dosen Pembimbing II, serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga hendak menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Sunyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Albert Maydiantoro, S. Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedi Miswar, S.Si., M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S. Pd., M. Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung; serta selaku Pembimbing Akademik (PA) dan sebagai Pembimbing I. Terimakasih atas kesempatan, waktu, tenaga, motivasi, bimbingan, perhatian, dan segala ilmu serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II. Terimakasih atas bimbingan, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini.
8. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku dosen Pembahas I atas masukan dan sarannya dalam pembuatan skripsi ini.
9. Bapak Susilo, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya.
10. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang dengan rela dan ikhlas memberikan ilmu yang dimilikinya kepada penulis.
11. Terimakasih kepada Ibu Nurhayati, S.Pd., M.Pd. selaku Koordinator Seminar yang telah membantu terselesainya skripsi ini.
12. Staf Program Studi PPKn Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian
13. Terkhusus dan yang paling istimewa yaitu kedua orang tuaku, Bapak Sigit Puji Astowo dan Ibu Siti Komariyah. Terima kasih atas keikhlasan, kesabaran ketulusan kasih sayang yang telah diberikan kepadaku, terima kasih telah merawat dan membesarkan ku hingga saat ini, terima kasih telah mengajarkanku untuk menjadi seseorang yang sederhana dalam menjalani kehidupan serta terima kasih telah mendoakanku, memberikan motivasi, dukungan dan finansial yang tak terhingga.
14. Teruntuk kakak-kakakku, Rudi Setiawan, Anelia Komala Dewi dan Ratih Yunita Sari terimakasih atas semua motivasi, dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih untuk sahabat-sahabat seperjuanganku di kampus “Rizal Nurhidayat, M.Aliief Fadilah, M.Arief Satria Wibowo, Genta Gumara, M.Bima Sakti, M.Arifi Hidayatulah, Bayu Akbar Maulana, Alpha Yoga

Mahardika, Afsarianti Nurhikmah, Ayu Sofiana, Sinta Permata Dewi, Laili Fauziah, Chika Tiara Sari, Indira Monica Azzahra, Bernilia Febrianti” atas segala kebaikan yang telah menjadi sahabat yang selama ini menjalani masa perkuliahan.

16. Teman-teman Program Studi PPKn angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk kebersamaannya selama ini.
17. Terimakasih juga untuk sahabat per-Pembimbing Akademikan, Rizal Nurhidayat, Murni Sari Dewi, Inayah Fitri, dan Novia Ristiani.
18. Terimakasih untuk kak Ade Ihza Kurniawan, kak Rahmat Kevin Priyatna, kak Fatimahtuz Zahra Asy Sopha dan kak Otoni Zai atas semua kesabaran, ketulusan,kebaikan, motivasi untuk menyelesaikan Skripsi dan kepedulian kepadaku selama masa perkuliahan.
19. Terimakasih untuk teman-teman KKN dan PLP ku, Sopan (Pendidikan Sejarah), Ikhsan (Pendidikan Geografi), Desi (Pendidikan Ekonomi), Catharina (Pendidikan Biologi), Nadia (Pendidikan Geografi), Riska (Pendidikan Matematika), dan Nana (Pendidikan Geografi) terimakasih untuk kebersamaannya selama 40 hari di Pekon Bandungbaru.
20. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu, serta rekan-rekan mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 20 November 2023

Penulis

Kukuh Bagus Wijanarko

NPM. 1913032025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan dimasa mendatang serta semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 20 November 2023

Penulis,

Kukuh Bagus Wijanarko

NPM. 1913032025

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
ABSTRCT.....	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
G. Ruang Lingkup Penelitian	7
1. Ruang Lingkup Ilmu	7
2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian	7
3. Ruang Lingkup Objek Penelitian	8
4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian	8
5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori	
1. Tinjauan Tentang Partisipasi	9
a. Tinjauan Tentang Partisipasi.....	9
1) Pengertian Partisipasi	9
2) Bentuk-Bentuk Partisipasi	10
3) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	13
4) Tingkat Partisipasi	15
2. Tinjauan Tentang Masyarakat	16
a. Pengertian Masyarakat	16
b. Unsur-Unsur Masyarakat	18
3. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik	18

a.	Pengertian Kebijakan Publik.....	18
b.	Tahapan dalam Pembuatan Kebijakan Publik	20
4.	Tinjauan Umum Tentang Manajemen	22
a.	Pengertian Manajemen.....	22
b.	Manajemen Pengelolaan Dana Desa.....	23
5.	Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Dana Desa	25
a.	Pengertian Pengelolaan	25
b.	Pengertian Desa.....	26
c.	Pengertian Dana Desa	28
d.	Tujuan Dana Desa	29
e.	Prinsip Penggunaan Dana Desa	30
f.	Prioritas Penggunaan Dana Desa	31
B.	Penelitian Yang Relevan	32
C.	Kerangka Berpikir	34

III. METODOLOGI PENELITIAN

A.	Metode Penelitian	36
B.	Populasi dan Sampel Penelitian	37
1.	Populasi	37
2.	Sampel	37
C.	Variabel Penelitian	39
D.	Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	39
1.	Definisi Konseptual	39
a.	Partisipasi Masyarakat	40
2.	Definisi Operasional	40
a.	Faktor Internal	40
b.	Faktor External	41
E.	Teknik Pengumpulan Data	41
1.	Angket	41
2.	Wawancara	42
F.	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	43
1.	Uji Validitas	43
2.	Uji Reliabilitas	44
G.	Teknik Analisis Data	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Langkah-Langkah Penelitian	47
1.	Persiapan Pengajuan Judul	47
2.	Penelitian Pendahuluan	47
3.	Pengajuan Rencana Penelitian	48
4.	Penyusunan Alat Pengumpulan Data	48
5.	Pelaksanaan Uji Coba Penelitian	48
a.	Uji Coba Validitas Angket	49
b.	Uji Coba Reliabilitas Angket	51
B.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1.	Sejarah Singkat Desa Sukoharjo II	52
2.	Lokasi Desa Sukoharjo II	53

3. Keadaan Penduduk	54
4. Visi dan Misi Desa	54
C. Deskripsi Data Penelitian	55
1. Pengumpulan Data	55
2. Penyajian Data	55
3. Penyajian Data Indikator	57
a. Usia	57
b. Tingkat Pendidikan	59
c. Pekerjaan	61
d. Jenis Kelamin	63
e. Kepemimpinan Pemerintahan Desa	65
f. Tingkat Komunikasi	67
D. Pembahasan Hasil Penelitian	68
1. Faktor Internal	68
a. Usia	68
b. Tingkat Pendidikan	72
c. Pekerjaan	75
d. Jenis Kelamin	79
2. Faktor Eksternal	82
a. Kepemimpinan Pemerintah Desa	82
b. Tingkat Komunikasi	86
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Data Partisipasi Masyarakat Desa Sukoharjo II Dalam Musrenbang Desa 2022	4
Tabel 3.1 Jumlah masyarakat Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	37
Tabel 3.2 Jumlah masyarakat Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang menjadi sampel	39
Tabel 3.3 Indeks Koefisien Realibilitas	45
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Angket Kepada 10 Responden di luar sampel menggunakan bantuan SPSS versi 25	50
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kepada 10 Responden Di Luar Sampel Menggunakan Bantuan SPSS Versi 25	52
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Indikator Usia	58
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Indikator Tingkat Pendidikan	60
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Indikator Pekerjaan	62
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Indikator Jenis Kelamin	64
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Indikator Kepemimpinan Pemerintah Desa....	66
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Indikator Tingkat Komunikasi	68

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan asas desentralisasi untuk menjalankan pemerintahannya, memberikan peluang serta kebebasan bagi seluruh daerah agar melaksanakan otonomi daerah. Proses desentralisasi yang berlangsung memberikan penyadaran betapa pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu melalui pemberdayaan potensi lokal. Meskipun di kondisi sekarang, kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada taraf kabupaten/kota, tetapi secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut wajib dimulai dan berasal dari level pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu desa. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Secara tegas didefinisikan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa ini diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa, dimana dipahami bahwa desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kewenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahannya, dengan harapan semua kepentingan serta keperluan masyarakat desa bisa terpenuhi atau di atur secara tepat. Karena pemerintah desa diyakini mampu lebih melihat kebutuhan yang harus lebih diprioritaskan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup persoalan lebih luas dan kompleks. Mengingat kondisi tersebut, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai

dengan persoalan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi warga serta prioritas dan arah pembangunan pedesaan yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 dalam Pasal 1 Ayat (1), menyatakan bahwa yang disebut Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola Dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud yaitu sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam memanfaatkan Dana Desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Pemanfaatan dana desa tentu dibutuhkan partisipasi langsung dari masyarakat, yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Hal ini sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 2 yang menyatakan bahwa masyarakat wajib berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa menurut Undang-

Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) yang melibatkan unsur-unsur penting yang berada di desa.

Musrembang merupakan sebuah mekanisme perencanaan dan institusi perencana yang ada di daerah serta sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (*top down planning*).

Musrembang adalah sebuah usaha yang benar-benar menjadi sebuah wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat serta bagaimana pemerintah merespon semua masalah tersebut.

Idealnya dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pengelolaan dana desa akan melibatkan semua elemen masyarakat, pemerintah dan pihak yang berkepentingan dimulai dari pada tahapan proses, penentuan dan pelaksanaan termasuk stakeholder secara bersamaan memikirkan bagaimana untuk membiayai dan mengimplementasikan hasil dari pada musrembang. Hal ini biasanya terjadi manakala pemerintah benar duduk secara bersama dan setara dalam hal memikirkan pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepan. Melihat dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa perencanaan adalah faktor yang paling utama dalam setiap proses pembangunan desa yang lebih baik. Perencanaan dapat menjadi sebuah faktor penentu dalam keberhasilan pengelolaan dana desa, apabila terciptanya suatu perencanaan yang baik dalam menentukan suatu program pembangunan yang tepat, maka setiap pelaksanaan pembangunan sudah dapat dilaksanakan dengan sangat baik pula.

Proses perencanaan dana desa akan berjalan dengan baik apabila seluruh lapisan masyarakat mulai dari lapisan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda serta dari aparat pemerintahan desa berpartisipasi dan bekerja sama dengan baik demi tercapaiannya tujuan bersama. Pentingnya persatuan dan kerjama secara bersama-sama dalam merencanakan dan menentukan suatu program-program pembangunan yang akan dilakukan di suatu daerah untuk mencapai tujuan bersama sehingga akan

dapat dinikmati oleh semua kalangan baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah sebagai pemegang kekuasaan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Desa Sukoharjo II secara umum kondisi partisipasi yang terjadi dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan dalam penentuan pembagian porsi dana desa dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tidak semua masyarakat namun hanya dihadiri oleh unsur-unsur sebagai keterwakilan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kehadiran yang dalam proses musrenbang desa seperti BHP, BKR, Kepala dusun, RW, RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, TP.PKK, Tokoh Pendidikan, BUMDES dan keterwakilan dari karang taruna, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Data Partisipasi Masyarakat Desa Sukoharjo II Dalam Musrenbang Desa 2022

No	Data Partisipasi	Jumlah Hadir
1	Badan HIPPUN Pemekonan	2
2	Bina Keluarga Remaja	1
3	Kepala dusun	4
4	Kepala RT	10
5	Tohoh Masyarakat	3
6	PKK	3
7	Pengelola PAUD	1
8	Kader Posyandu	4
9	BUMDes	1
10	Karang Taruna	2
11	Warga	2
Jumlah		33

Sumber : Buku Notulensi Rapat Desa Sukoharjo II

Terlihat dari tabel diatas bahwa yang menghadiri Musrenbang hanya perwakilan masyarakat saja dan forum musyawarah hanya didominasi sebagian orang yang mampu menyampaikan aspirasi masyarakat. Selebihnya hanya datang dan mendengarkan saja sehingga partisipasi yang terjadi belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti dari faktor pendidikan, dimana masih banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan dana desa. Padahal, memiliki

partisipasi yang tinggi dalam pengelolaannya. Hal ini tidak lain disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Sukoharjo II. Selain itu pekerjaan juga menjadi salah satu faktor partisipasi masyarakat, dimana mayoritas masyarakat Desa Sukoharjo II bekerja sebagai petani. Pekerjaan ini sangat menyita waktu masyarakat, terutama saat musim tanam tiba karena pada pagi hari mereka sudah harus beraktifitas dan pulang pada siang atau sore hari.

Usia juga menjadi faktor dalam keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dana desa. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. Di Desa Sukoharjo II masyarakat dengan usia 35-50 tahun memiliki keaktifan berpartisipasi yang relatif lebih tinggi dibanding pada kelompok usia muda. Rendahnya partisipasi kelompok muda ini dikarenakan masih ada rasa sungkan terhadap para orang tua yang dianggap senior sehingga jarang untuk ikut menghadiri Musrenbangdes. Lalu faktor jenis kelamin serta kurangnya komunikasi perangkat Desa dalam menyosialisasikan program dana desa menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait dana desa.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Sukoharjo II, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Sehubungan dengan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Masyarakat masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
2. Masyarakat lebih memilih terfokus pada kesibukan masing-masing sehingga bersifat acuh tak acuh dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
3. Masih rendahnya partisipasi generasi muda dalam proses perencanaan dana desa.
4. Masih kurangnya komunikasi perangkat Desa dalam menyosialisasikan program dana desa ke masyarakat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah supaya peneliti tidak terlalu luas, maka penelitian ini membatasi permasalahan hanya pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu?”

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat mengembangkan konsep ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam ruang lingkup kajian pendidikan politik dan kenegaraan tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat di Pekon Sukoharjo II agar lebih mengerti dan paham terhadap betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Bagi peneliti, dapat menambah informasi pengetahuan dan kemampuan berfikir serta menambah wawasan terkait keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pengambilan keputusan.
3. Sebagai bahan referensi kepada peneliti selanjutnya yang ingin melaksanakan penelitian lebih lanjut berdasarkan relevansi permasalahan yang dikaji.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kajian pendidikan politik dan kenegaraan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

2. Ruang Lingkup Subjek

Dalam penelitian ini maka yang menjadi subjek penelitiannya ialah masyarakat Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

3. Ruang Lingkup Objek

Objek penelitian ini adalah membahas tentang “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu”.

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

5. Ruang Lingkup Waktu

Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Nomor 7222/UN26.13/PN.01.00/2022 pada tanggal 21 Juli 2022.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Partisipasi

a. Definisi Partisipasi

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan "partisipasi" berarti hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Selanjutnya Juliantara (2002) menjelaskan bahwa partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Howell S. Baum (2015) memberikan definisi dari partisipasi masyarakat merujuk pada "keterlibatan anggota masyarakat dalam pemerintahan dalam berbagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, dan bentuk-bentuk termasuk aktivitas yang memungkinkan beberapa individu dan kelompok –kelompok yang representative untuk mempengaruhi keputusan publik (begitu juga dengan pihak privat) yang menggambarkan kepentingan mereka".

Menurut Abu Huraerah (2018) partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya.

Sumarto (2004) juga memberikan definisi partisipasi masyarakat sebagai “ proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Pendapat tersebut menggambarkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam segala aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan ataupun dalam hal pemantauan atau pengawasan. Selama ini partisipasi diperlakukan sebagai masukan dalam proses pembangunan, sebagai suatu prasyarat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan. Partisipasi diartikan sebagai dana dan daya yang dapat disediakan atau dapat dihemat sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

b. Bentuk-bentuk Partisipasi

Secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok atau masyarakat dalam program pembangunan. Pernyataan ini mengandung arti seseorang, kelompok atau masyarakat senantiasa dapat memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi. Kegiatan sukarela juga merupakan bentuk partisipasi yang memberikan kesempatan kepada individu dan masyarakat untuk bekerjasama dan meluangkan sedikit

waktu yang dimiliki untuk melakukan perubahan positif bagi kehidupan masyarakat. Warga negara muda saat ini banyak yang telah melibatkan diri di dalam kegiatan sukarela di berbagai tempat dengan berbagai pilihan jenis kesukarelaan yang dapat diikuti (Adha, 2019).

Ndraha (2011) menjelaskan lima bentuk partisipasi yang meliputi: (1) Peran serta dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai suatu titik awal dalam perubahan sosial. (2) Peran serta dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi, dan melaksanakan) menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya. (3) Peran serta dalam pelaksanaan operasional pembangunan. (4) Peran serta dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan. (5) Peran serta dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut pendapat Hamijoyo dan Iskandar dalam Huraerah (2011), memperinci bentuk-bentuk partisipasi sebagai berikut: 1) Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sono, pertemuan atau rapat. 2) Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya. 3) Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya. 4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri. 5) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), nyambungan, mulang sambung.

Selanjutnya menurut Cohen dan Uphoff (1977), membagi empat bentuk partisipasi yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan (*Participation in decision making*).

Setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau tingkat lokal.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan (*Participation in implementation*)

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Selain partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati.

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil (*participation in benefit*)

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat

banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Namun, pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat sarasannya. Padahal seringkali masyarakat sasaran tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

4. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi (*participation in evaluation*)

Pembangunan Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, umumnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

1. Faktor internal yaitu mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, yaitu umur, jenis kelamin, status dalam keluarga, tingkat pendidikan, etnis, agama, bahasa, pekerjaan, tingkat pendapatan, jarak rumah dengan lokasi pekerjaan (Cohen, J. and Uphoff, 1977)

2. Faktor eksternal adalah semua pihak luar yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program tersebut, antara lain pengurus Desa, tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah, NGO, pihak ketiga (LSM, Yayasan sosial, Perguruan Tinggi) (Sunarti, 2003).

Selain itu ada juga faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson dalam Soetomo (2008) mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor internal, menurut Slamet (2003), untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.
2. Faktor eksternal, menurut Sunarti (2003), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu dalam hal ini stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW),

tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

Lisdiana (2013) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu: Yang pertama, usia orang dengan usia menengah keatas cenderung lebih banyak berpartisipasi dari pada kelompok usia lain. Kedua, jenis kelamin kebiasaan dalam bangsa kita peranan perempuan hanya mengurus rumah tangga sehingga hal ini mengakibatkan lelaki lebih banyak memiliki waktu berpartisipasi dalam setiap program. Ketiga, pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi. Keempat, pekerjaan dan penghasilan pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup dapat mendorong untuk berpartisipasi. Kelima, lamanya seseorang tinggal serta lamanya seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat partisipasinya.

d. Tingkat Partisipasi

Tingkatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan perlu diketahui oleh agen pembangunan. Oleh karena itu, indikator dalam mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat penting dipahami secara benar. Mengukur partisipasi masyarakat menurut Ife dan Tesoriero (2016) secara kualitatif mencakup (1) Suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi; (2) Dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang bertambah kuat; (3) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti keuangan dan manajemen proyek; (4) Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan; (5) Peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam mengubah keputusan menjadi aksi; (6) Meningkatnya jangkauan partisipasi melebihi proyek untuk mewakilinya dalam organisasi-organisasi lain; (7) Pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat;

(8) Meningkatnya jaringan dengan proyekproyek, masyarakat, dan organisasi lainnya; dan (9) Mulai mempengaruhi kebijakan.

Wilcox (1994) mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan partisipasi, yaitu (1) Memberikan informasi (*information*); (2) Konsultasi (*consultation*); yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut; (3) Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*); dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan; (4) Bertindak bersama (*acting together*); dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan; (5) Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*); dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

2. Tinjauan Umum tentang Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Pengertian Masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup bersama di suatu daerah dan membentuk sistem yang setengah terbuka dan setengah tertutup dan di mana interaksi antara individu individu dalam kelompok berlangsung. Secara etimologis, dalam sebuah kata “Masyarakat” yakni telah berasal dari bahasa Arab, yang berarti “Musyarak”, yang berarti hubungan (interaksi). Jadi definisi masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama di satu tempat dan berinteraksi satu sama lain dalam komunitas yang terorganisir.

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan

berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: Interaksi antar warga-warganya, Adat istiadat, Kontinuitas waktu, dan Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat).

Menurut Noor (2007) masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Tatanan kehidupan, norma-norma yang mereka miliki itulah yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam lingkungan mereka, sehingga dapat membentuk suatu kelompok manusia yang memiliki ciri kehidupan yang khas.

Soekanto (2002) menjelaskan bahwa para antropologi sosial biasanya mengartikan masyarakat sebagai wadah dari orang-orang yang buta huruf, mengadakan reproduksi sendiri, mempunyai adat istiadat, mempertahankan ketertiban dengan menerapkan sanksi-sanksi sebagai sarana pengendalian sosial, dan yang mempunyai wilayah tempat tinggal yang khusus. Istilah masyarakat terkadang dipergunakan dalam artian "*gesellschaft*" atau sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas sifatnya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi tertentu, dalam hal ini maka masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu pula.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya,

wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan

b. Unsur-unsur Masyarakat

Dari definisi masyarakat, dapat dilihat bahwa masyarakat terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. a) Manusia yang hidup bersama b) Berinteraksi dalam waktu yang cukup lama c) Adanya kesadaran anggotanya sebagai satu kesatuan d) Suatu sistem kehidupan bersama yang menciptakan kebudayaan.

Mario Levi dalam (Atik Catur Budiati, 2009). Berpendapat bahwa unsur-unsur masyarakat menurut pemikirannya adalah masyarakat terdiri dari empat kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah kelompok dapat disebut sebagai suatu masyarakat: 1) Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seseorang anggotanya 2) Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran. 3) Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada. 4) Kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama.

Edwar shilis dalam (Atik Catur Budiati, 2009) berpendapat bahwa kriteria masyarakat adalah, masyarakat pada aspek pemenuhan kebutuhan sendiri yang dibaginya dalam tiga komponen yaitu pengaturan, reproduksi sendiri, dan penciptaan diri. Dari bernagi rumusan masyarakat tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat secara sosiologi mempunyai makna khusus yang berbeda dengan penggunaan kata sehari-hari karna tidak semua kumpulan manusia di suatu tempat di sebut masyarakat.

3. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh institusi atau pejabat pemerintah. Artinya di sini pusat dari adanya suatu kebijakan adalah mengenai dan terpusat pada tatanan pemerintah. Segala bentuk kebijakan

merupakan keputusan kolektif dari Pemerintah. Menurut Solihin Abdul Wahab (2015) menjelaskan bahwa kebijakan ialah pedoman untuk bertindak, pedoman itu bisa saja sederhana atau kompleks, yang bersifat umum atau khusus, dan juga bersifat luas atau sempit dengan terperinci. Yang dimana Bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik ataupun privat.

Menurut William N Dunn (1994), kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Chaizi Nasucha (2004), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Kebijakan merupakan sesuatu hal yang berfungsi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dengan melihat berbagai persoalan yang ada, yang akan menjadi program dari produk kebijakan, namun suatu program kebijakan yang sudah diimplementasikan harus di kaji dan di analisis kembali sebagai bahan evaluasi kedepannya, dengan memahami analisis kebijakan sebagai suatu dari proses ilmu penelitian. Dalam hal ini menganalisis suatu kebijakan merupakan usaha untuk dapat merekomendasikan kebijakan yang lebih baik. Usaha ini bermula dari penyajian secara cermat informasi dengan menunjukkan adanya masalah dari kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli Kebijakan tersebut dapat definisikan bahwa kebijakan publik yang lebih tepat merupakan suatu definisi yang menekankan tidak hanya pada apa yang diusulkan Pemerintah, melainkan juga sebagai arah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Dengan demikian manfaat bisa dapat dirasakan sebagai bentuk dari pemecahan masalah dengan dampak yang akan dirasakan secara langsung di masyarakat. Seperti halnya kebijakan program bantuan langsung tunai dana Desa yang merupakan sebuah instruksi dari para perumus kebijakan yaitu pemerintah pusat, kepada pelaksana kebijakan yaitu pemerintah desa.

b. Tahapan dalam Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam proses pembuatan kebijakan publik, dibagi dalam beberapa tahapan yang dikelompokkan untuk memudahkan dalam menganalisis suatu kebijakan publik. Tahap penilaian kebijakan bisa dilihat dari sejauh mana implementasi kebijakan itu terlaksana seperti yang dikemukakan oleh Wiliam Dunn sebagai tahap kebijakan berikut ini:

1. Tahap penyusunan agenda (*Agenda Setting*)

Pada tahap penyusunan agenda yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan masalah yang terjadi di publik yang harus dipecahkan. Karena, tidak semua masalah yang terjadi, akan menjadi masalah publik, tidak semua masalah yang terjadi juga menjadi isu publik, dan tidak semua isu publik menjadi agenda pemerintah. Suatu masalah menjadi masalah publik bila ada seseorang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan tersebut.

2. Tahap formulasi kebijakan (*Policy formulation*)

Setelah masalah masuk ke agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh pembuat kebijakan yaitu pemerintah. Masalah-masalah tersebut didefinisikan yang selanjutnya dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/ policy option*) yang ada. Pada tahapan ini masing-masing aktor – aktor pembuat kebijakan akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan cara pemecahan terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Dari banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan pada akhirnya salah satu dari alternatif tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4. Tahap implementasi kebijakan (*Policy Implementation*)

Tahap ini adalah tahap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat dan di putuskan bersama. Jika suatu program kebijakan tidak diimplementasikan hanya akan menjadi catatan-catatan program elit saja, seperti dilaksanakan oleh badan-badan administrasi ataupun lembaga lembaga pemerintah ditingkat bawah.

5. Tahap Penilaian Kebijakan

Tahap penilaian Kebijakan adalah tahap terakhir dimana proses implementasi kebijakan sudah dilaksanakan atau terealisasikan. Pada tahap ini kebijakan yang sudah dijalankan akan dilihat keefektifannya oleh unit-unit pemeriksaan instansi pemerintahan atau pun lembaga masyarakat sipil yang berkaitan, sebagai tujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang dibuat sesuai dengan dampak atau hasil yang diinginkan, untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu, ditentukan ukuran dan kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

4. Tinjauan Umum tentang Manajemen

a. Pengertian manajemen

Manajemen merupakan mengatur segala sesuatu kegiatan yang sesuai dengan aturan yang dibuat berdasarkan fungsi manajemen itu sendiri demi tercapainya tujuan yang sudah ditentukan. Manajemen itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *namus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Gabungan kedua kata tersebut menjadi *managere* menangani. Pengertian manajemen berasal dari kata *to the manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan dengan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsifungsi manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Terry (2009) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Andrew F. Sikula (2011) mengungkapkan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut Hamalik istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal ini senada dengan yang dikemukakan dengan Baldrone yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia mencapai untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

b. Manajemen Pengelolaan Dana Desa

Indikator manajemen pengelolaan dana desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pertanggungjawaban atau Pelaporan. Agar program-program dapat terlaksana tentunya perlu suatu manajemen pengelolaan yang baik. Pengelolaan dana desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDes, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintahan, termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Berikut adalah penjelasan indikator manajemen dana desa menurut Arna Suryani (2019):

1. Membuat Perencanaan

Membuat perencanaan adalah fungsi pertama dari manajemen. Perencanaan merupakan penyusunan konsep suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, sebelum melakukan tindakan di perlukan rencana yang matang sesuai aturan yang dibuat bersama untuk tujuan yang ingin di capai.

Melihat tujuan yang ingin diraih lalu memikirkan langkah yang akan dilakukan dengan menyusun konsep kegiatan yang terstruktur merupakan perencanaan. Ada tiga langkah dalam perencanaan, yang pertama formulasi nilai, kedua identifikasi cara meraih tujuan, dan yang ketiga melaksanakan.

Dalam manajemen dana desa perencanaan bisa di kaitkan dengan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota perencanaan pembangunan desa yang di susun secara berjangka dan di tetapkan dengan peraturan Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan dengan spesifik, realistis demi terlaksananya tujuan dari yang telah direncanakan. Pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaan merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintah termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya.

3. Pengawasan

Pengawasan bertujuan untuk melihat kinerja para pekerja serta memberi arahan agar tidak terjadi kesalahan pada saat bekerja serta melihat berapa besar persentase atau perkembangan dari tugas yang dijalankan dengan tujuan yang hendak dicapai. Pengawas dalam suatu kegiatan pembangunan merupakan orang yang memberikan komando atau mengontrol keadaan untuk menghindari kesalahan sekecil mungkin atau disebut pula controlling. Dengan adanya pengawas pekerja lebih mudah mengerjakan tugasnya masing-masing dan pekerjaanpun tidak terbengkalai. Pengawas yang baik adalah memberikan arahan kepada pekerjanya, mengontrolnya dan tidak memaksakan para pekerja serta tidak mangkir dari pekrjanya.

4. Laporan Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDDesa, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDDesa. Laporan dan pertanggung jawaban ditetapkan dengan peraturan desa dengan lampiran format laporan pertanggung jawaban APBDes.

5. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Dana Desa

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.

Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Sementara Terry (2009) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur.

Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu suatu kegiatan, yang meliputi fungsifungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

b. Pengertian Desa

Pengertian Desa menurut etimologi, berasal dari bahasa Sanskerta yakni “dhesi” yang berarti tanah tumpah darah atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2003) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Oleh karena itulah, makna desa bagi setiap orang sangatlah penting dan bukanlah sesuatu yang berarti buruk. Istilah ini sudah ada sejak abad ke 11 ketika Nusantara masih terbagi menjadi beberapa kerajaan. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, kata desa berarti sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung atau dusun. Kata desa ini menjadi negatif ketika diartikan sebagai udik

atau dusun yang sebenarnya mengartikan pada sebuah tempat dan bukan sifat.

Begitu pula yang dikatakan R. Bintarto (2007), bahwa desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Hal serupa yang dikatakan Paul H. Landis (2007) menjelaskan lebih detail dalam hal fisik yang bersangkutan dengan penduduk yang tinggal dalam sebuah desa. Menurutnya, desa adalah daerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang. Sehingga dimungkinkan ada desa yang tidak termasuk golongan desa disini.

Pendapat lainnya tentang pengertian desa juga ditambahkan oleh Rifhi Siddiq (2014) yang memandangnya dari sisi sosial. Menurut beliau desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen.

Menurut Soenarjo (1984) : desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Menurut Beratha (1982) : Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan Hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan Desa adalah suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu yang ditempati oleh sejumlah orang yang disebut masyarakat yang memiliki satu kesatuan dan adat istiadat yang hidup saling mengenal dan bergotong-royong. Masyarakat desa sebagian besar mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani atau nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Desa ditempati oleh masyarakat yang saling mengenal yang didasari oleh hubungan kekerabatan, kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang menjadikannya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan pada adat istiadat, sehingga akan terwujud ikatan lahir batin diantara warga masyarakat.

c. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya Dana Desa dipergunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan

atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa, yang mana nantinya dana tersebut diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan memberdayakan masyarakat.

d. Tujuan Dana Desa

Dalam undang-undang Nomor 6 tentang desa, tujuan pengalokasian dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi dan menjadikan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Adapun tujuan dari dana desa menurut Sri Mulyani (2017) yang berlandaskan hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik didesa.
- 2) Mengentaskan kemiskinan.
- 3) Memajukan perekonomian desa.
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa, apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana tingkat Desa adalah sebesar 30% alokasi dana desa yang digunakan untuk penyelenggaraan desa dan oprasional pemerintahan desa. Sedangkan sebesar 70% dana desa digunakan untuk pengeluaran pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi tingkat desa desa, pemberdayaan dibidang seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama pengentasan kemiskinan dan pendanaan untuk pimpinan. Lembaga kemasyarakatan desa, BUMDes, kelompok usaha berbasis potensi ekonomi masyarakat pedesaan, dan bantuan dana kepada intansi desa seperti RT, RW, PKK, Karang taruna, Linmas.

e. Prinsip Penggunaan Dana Desa

Sri Mulyani (2017) menyatakan dalam penetapan prioritas pembangunan dana desa perlu diperhatikan perinsip-perinsip penggunaan dana desa, diantaranya:

- 1) Keadilan, yaitu: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- 2) Kebutuhan prioritas, yaitu: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- 3) Kewenangan desa, yaitu: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa.
- 4) Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
- 5) Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal.
- 6) Tipologi desa, yaitu: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan nilai-nilai yang menginspirasi pengelolaan keuangan desa. prinsip ini memunculkan prinsip-prinsip dasar yang harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak ada gunanya apabila tidak diwujudkan dalam tindakan.

f. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi pelaksanaan program dan kegiatan Hak Asal Usul dan Kewenangan perangkat daerah/ditingkat desa yang dibiayai oleh Dana Desa
- 2) Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa
- 3) Sebagai acuan bagi Pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan Dana Desa.

Dalam Permendes yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dalam Pasal 5 Ayat (2) Prioritas penggunaan dana desa ini diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs desa melalui:

- 1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
- 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
- 3) Adaptasi kebiasaan baru Desa

Penjelasan lainnya yaitu, Dana tingkat desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tingkat desa setempat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan serta pengentasan kemiskinan. Tergantung pada kondisi dan potensi desa, serta sesuai dengan dengan pencapaian

tujuan RPJMDes dan RKPDes tahunan, dana desa diprioritaskan untuk mendanai bidang pemberdayaan masyarakat melalui :

- 1) Pendanaan desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok
- 2) Dana tingkat desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa
- 3) Dana desa lebih diutamakan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal, peningkatan kapasitas pengembangan kewirausahaan masyarakat pedesaan, peningkatan pendapatan, dan perluasan skala ekonomi masyarakat pedesaan.

Menurut asas pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD, semua kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat desa, harus tunduk pada administrasi, teknis, dan hukum. Penggunaan dana desapat sasaran, ekonomi, efisien, efektif, adil dan terkendali.

B. Kajian Penelitian Relevan

Penelitian ini adalah tentang Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan data penelitian eksplorasi dan observasi peneliti menemukan beberapa tulisan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Fiky Riski mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2018 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2018”. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam mengawasi alokasi dana

desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengawasi alokasi dana Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Alokasi Dana Desa yang terdiri dari tiga bentuk yaitu (1) Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan (3) Partisipasi pada tahap pengawasan. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa yaitu (1) tidak adanya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat yang menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa. (2) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa, (3) Masyarakat hanya mementingkan urusan pribadi.

Persamaan penelitian ini dengan judul penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama berupaya mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah dalam penelitian ini fokus pada pengelolaan Dana Desa dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan perekonomian desa, sedangkan penelitian yang akan peneliti laksanakan lebih cenderung pada fokus pada penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Arapah mahasiswi Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh pada tahun 2019 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Perkampungan Suku Gayo Dan Perkampungan Suku Jawa”. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan metode analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Blang Rongka dan Mekar Ayu sudah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa,

namun unsur perempuan masih sangat sedikit. Partisipasi masyarakat Blang Rongka masih dalam tahap perencanaan. Berbeda dengan masyarakat Mekar Ayu, masyarakat telah berpartisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan atau evaluasi.

Persamaan penelitian ini dengan judul penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama berupaya mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah dalam objek kajian penelitiannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dora Primapurnama Belaya objek penelitiannya yaitu, perbedaan partisipasi masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi pengelolaan Dana Desa di Perkampungan suku Gayo dan suku Jawa. Sedangkan objek yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang akan peneliti laksanakan lebih cenderung pada fokus pada penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sukoharjo II.

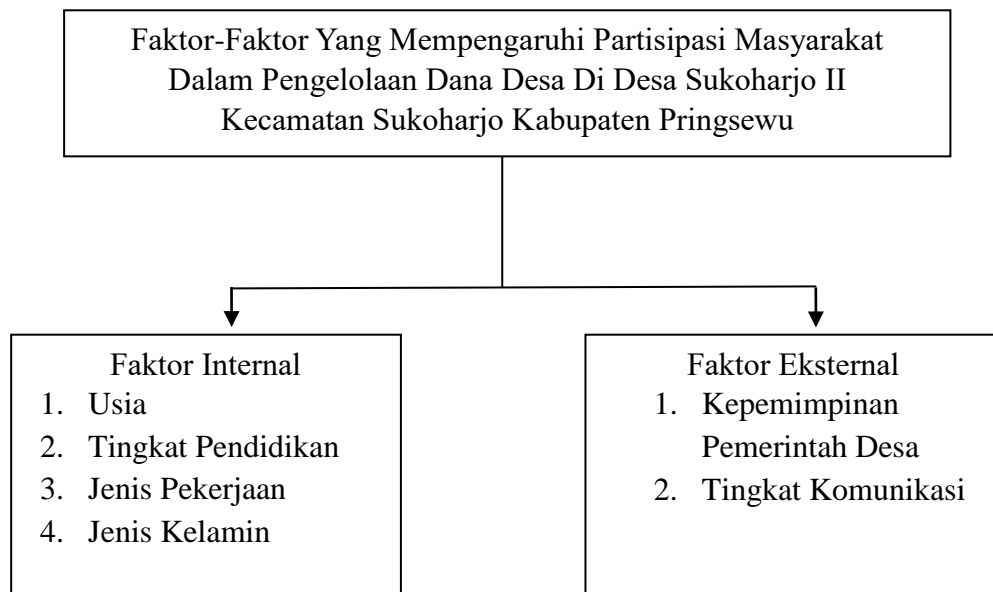
C. Kerangka Pikir

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat terkadang masih menjadi problematika, karena dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut, seperti faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Hal tersebut dapat disederhanakan dengan dibuat kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pikir



III. METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, terdapat variabel penelitian yakni partisipasi masyarakat sebagai variabel bebas. Dengan menggunakan skala *likert*, indikator-indikator variabel tersebut akan ditransformasikan menjadi item-item pertanyaan yang dimasukkan dalam kuesioner. Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis menggunakan program statistik yaitu SPSS 26 dan untuk merapikan data menggunakan bantuan *microsoft excel*.

Penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen, sehingga data jumlah dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. Jadi, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian deskriptif ini peneliti ingin memaparkan data-data dan menganalisis secara objektif serta menunjukkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan suatu komponen terpenting dalam penelitian, mengingat populasi akan menentukan validitas data dalam penelitian. Menurut Arikunto (2010) "Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian". Jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

Tabel 3.1 Jumlah masyarakat Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

No	Nama Dusun	Jumlah Masyarakat
1	Dusun Satu	719
2	Dusun Dua	559
3	Dusun Tiga	626
4	Dusun Empat	613
Jumlah		2.517

Sumber: Data Monografi Desa Sukoharjo II

2. Sampel

Menurut Arikunto (2010: 174) "Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang di teliti)". Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antar 10-15% atau 20-25% lebih. Berdasarkan jumlah populasi sebesar 2.517 maka sampel penelitian ini ialah:

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

d^2 : Presisi atau batas toleransi kesalahan pengambilan sampel.

Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 2.517 masyarakat yang memiliki hak berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, dimasukkan ke dalam rumus diatas dengan tingkat presisi yang ditetapkan yaitu 10%.

Jadi dijabarkan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1} = \frac{2.517}{2.517(0,1^2) + 1} = \frac{2.517}{26,17} = 96,17 = 96$$

Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 96 masyarakat. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Sampel Random atau sampel acak, sehingga peneliti memberi hak yang sama kepada setiap masyarakat untuk memperoleh kesempatan (*chance*) dipilih menjadi sampel. Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan melihat jumlah masyarakat yang berdomisili di Desa Sukoharjo II. Adapun untuk menentukan sampel dari masing-masing bagian digunakan rumus *Stratified Random Sampling* sebagai berikut:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \cdot n$$

Keterangan :

- N_i : Jumlah populasi secara stratum
- n : Jumlah sampel seluruh
- n_i : Jumlah sampel menurut stratum
- N : Jumlah populasi seluruh

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah masyarakat Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang menjadi sampel.

No	Nama Dusun	Jumlah	Perhitungan Sampel	Jumlah Sampel
1	Dusun Satu	719	$\frac{719}{2.517} \times 96 = 27,42$	27
2	Dusun Dua	559	$\frac{559}{2.517} \times 96 = 21,32$	21
3	Dusun Tiga	626	$\frac{626}{2.517} \times 96 = 23,87$	24
4	Dusun Empat	613	$\frac{613}{2.517} \times 96 = 23,68$	24
Jumlah		2.517	96	

Sumber: Perhitungan oleh penulis

C. Variable Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) variabel penelitian adalah segala sesuatu dalam bentuk apa saja yang peneliti putuskan untuk diteliti guna mengumpulkan informasi dan dapat ditarik kesimpulannya. Pengertian tersebut membawa pada kesimpulan bahwa variabel penelitian adalah segala hal yang telah ditentukan peneliti untuk diteliti hingga menghasilkan informasi yang dapat ditarik menjadi kesimpulan. Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variabel yaitu variabel bebas (X). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

D. Definisi Konseptual dan Oprasional

1. Definisi Konseptual Variabel

Definisi Konseptual adalah penjelasan suatu konsep yang dijadikan pedoman dalam penelitian, dengan tujuan untuk mempermudah penelitian. Definisi konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi yang dimaksud dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat menurut Syahrul Syamsi (2014) adalah proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Hasniati (2017) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dengan cara menjadi subyek atau aktor dalam pembangunan desa. Masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan yang disebut musrenbang, pelaksanaan atau pelaksanaan program, dan aspek kontrol atau pengawasan pelaksanaan program yang didanai di biayai oleh dana desa. Sedangkan Bentuk partisipasi dapat berupa tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu yang dimiliki masyarakat.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan yang menjadikan variable-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu

kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan pekerjaan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak yang menjadi stakeholder dengan partisipan yang dapat mempengaruhi partisipasi karena partisipan akan dengan sukarela terlibat dalam suatu kegiatan yang diinstruksikan stakeholder. Faktor eksternalnya seperti kepemimpinan pemerintah desa, tingkat transparansi dan tingkat komunikasi.

Dengan tingkat keterlaksanaan yang diukur yaitu:

- 1) Berpengaruh, bila indikator dari partisipasi masyarakat tersebut memiliki pengaruh pada populasi masyarakat Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
- 2) Cukup berpengaruh, bila telah terbentuknya partisipasi masyarakat pada populasi masyarakat Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
- 3) Kurang berpengaruh, bila indikator dari partisipasi masyarakat tersebut belum berpengaruh pada masyarakat Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pokok

a. Angket

Menurut Sugiyono (2007) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jadi, kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dan dibagikan kepada responden sebelum penelitian dilakukan.

Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari responden. Jenis angket yang digunakan peneliti dalam

penelitian ini adalah angket tertutup yang diisi oleh responden sesuai dengan kolom yang telah disediakan peneliti. Untuk mempermudah peneliti mengumpulkan data. Sasaran angket ini yaitu masyarakat Desa Sukoharjo II.

Skor bobot yang berbeda-beda pada setiap item yang memiliki tiga alternatif jawaban yaitu sebagai berikut:

- 1) Alternatif jawaban yang mendukung diberi skor 3
- 2) Alternatif jawaban yang cukup mendukung diberi skor 2
- 3) Alternatif jawaban yang tidak mendukung diberi skor 1

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner serta dengan cara wawancara. Adapun skala ukuran dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Sugiyono (2013) mendefinisikan skala *likert* sebagai skala *likert* yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Fenomena sosial inilah yang akan dijadikan sebagai variabel pada penelitian, secara tepat telah ditentukan oleh peneliti untuk penelitian ini. Variabel yang akan diukur diubah menjadi indikator variabel dengan menggunakan skala *likert*. Komponen instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan kemudian dirangkai dengan menggunakan indikator sebagai titik tolak.

2. Teknik Penunjang

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu sumber informasi yang didapatkan melalui metode tanya jawab dengan narasumber yang dituju. Wawancara telah dilakukan oleh penulis dalam rangka melakukan studi pendahuluan untuk menemukan letak permasalahan yang harus diteliti. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin, dimana pihak yang mewawancarai yaitu peneliti sudah mempersiapkan dan memiliki daftar pertanyaan secara

rinci dan detail mengenai topik yang akan ditanyakan kepada narasumber. Adapun tujuan wawancara ini dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat data penelitian yang belum lengkap. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tentu saja berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kebenaran sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid dan benar mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang secara tepat, berikut penulis menggunakan teknik korelasi product moment dengan rumus. Menurut Sarwono (2006) Validitas adalah sebuah skala pengukuran dikatakan valid apabila skala itu digunakan untuk mengukur apa yang diukur.

Pengujian dilaksanakan dengan memakai uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yakni $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, jadi instrumen dinyatakan valid. Supaya memudahkan uji validitas di dalam penelitian maka dilakukan dengan memakai bantuan program Statistical Product and Service Solution atau SPSS. Adapun kriteria diterima atau tidaknya suatu data valid atau tidak dalam program SPSS (Prayitno, 2012).

- a. Berdasarkan nilai korelasi :
 - 1) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dinyatakan valid.
 - 2) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid.

b. Berdasarkan signifikansi :

- 1) Jika nilai signifikansi $> \alpha$ (0,05) maka item dinyatakan tidak valid.
- 2) Jika nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05) maka item dinyatakan valid.

Langkah-langkah menghitung validitas menggunakan SPSS versi 25 yaitu:

1. Persiapkan data angket yang telah dirapikan dalam file *doc* atau *excel* sehingga sudah berbentuk tabulasi data angket. Buka program SPSS versi 26, kemudian klik *Variable View* pada bagian pojok kiri bawah program. Pada bagian Name tuliskan nomor pada item sesuai dengan kebutuhan misalnya Item_1 sampai Item_20 terakhir tulis Skor_total. Pada Decimals ubah semua menjadi angka 0, untuk bagian *Measure* pilih *Scale*, abaikan saja untuk pilihan yang lainnya.
2. Klik *Data View* (di bagian pojok kiri bawah) dan masukkan data skor angketnya, bisa dilakukan dengan cara copy paste dari tabulasi data angket yang sudah dipersiapkan tadi atau memasukkan data dengan cara manual yaitu diketik satu-persatu.
3. Selanjutnya, pilih menu *Analyze*, kemudian pilih sub menu *Correlate*, lalu pilih *Bivariate*.
4. Kemudian muncul kotak baru, dari kotak dialog "*Bivariate Correlations*", masukkan semua variabel ke kotak *Variables*. Pada bagian "*Correlation Coefficients*" centang (✓) *Pearson*, pada bagian "*Test of Significance*" pilih *Two-tailed*. Centang *Flag significant Correlations* lalu klik *Ok* untuk mengakhiri perintah.
5. Selanjutnya akan muncul *Output* hasilnya.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2010) Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen itu sudah baik. Jika suatu instrumen mengukur item yang sama lagi sementara keadaan sekitarnya

tetap sama dan temuannya sama, instrumen dikatakan stabil. Derajat konsistensi data atau temuan penelitian disebut reliabel. Cara mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan bantuan SPSS versi 25.

Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Indeks Koefisien Reliabilitas

Nilai Interval	Kriteria
0,80-1,00	Sangat Tinggi
0,60-0,79	Tinggi
0,40-0,59	Cukup
0,20-0,39	Rendah
<0,20	Sangat Rendah

Sumber : Wibowo (2012)

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji reliabilitas dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item pertanyaan/pernyataan, dalam hal ini skor total tidak diikut sertakan.
- b. Melakukan analisis menggunakan perintah *analyze* kemudian *scale reliability analysis*.
- c. Membandingkan nilai *cronbach's alpha* dengan r tabel.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data berusaha untuk mengurangi kompleksitas dalam data sehingga mudah dibaca dan dianalisis. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kuantitatif, yaitu dengan mengubah kata menjadi frasa dan angka secara metodelis. Setelah pengumpulan semua data yang diperlukan, analisis dalam penelitian ini diselesaikan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi data dan kemudian memprosesnya.

Adapun teknik analisis data dengan distribusi frekuensi sebagai berikut:

1. Menentukan klasifikasi skor dengan menggunakan rumus interval, yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Terendah

K = Kategori

Untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Besarnya persentase

F = Jumlah alternatif seluruh item

N = Jumlah perkalian antar item dan responden

Untuk menafsirkan banyaknya persentase yang diperoleh menggunakan kriteria sebagai berikut:

76% - 100% = baik

56% - 75% = cukup

40% - 55% = tidak cukup

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, maka dapat peneliti simpulkan bahwa :

1. Faktor usia memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa karena seiring bertambahnya usia mempengaruhi pengalaman dan kesadaran masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan dana desa, dimana masyarakat Sukoharjo II beranggapan bahwa golongan tua dianggap lebih berpengalaman atau senior. Sehingga dalam partisipasinya dalam pengelolaan dana desa para senior ini lebih dominan dan lebih banyak memberikan pendapat baik berupa masukan, saran atau dalam hal menetapkan keputusan.
2. Faktor tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa karena masyarakat Sukoharjo II beranggapan pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, dimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dana desa jika memiliki pendidikan yang baik, karena pengetahuan, sikap, dan keterampilan erat hubungannya dengan pendidikan. Namun, masih ada juga masyarakat yang dalam golongan pendidikan tinggi mereka enggan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa dengan alasan adanya faktor pekerjaan dan juga ada yang berterus terang kurang bersemangat karena masyarakat cenderung pasif dan hanya mengikuti saja.

3. Faktor pekerjaan memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa karena masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan yang mana menurut mereka semakin sibuk bekerja semakin sulit untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Sehingga jika mereka memiliki waktu senggang saat sudah selesai bekerja mereka memakai waktu itu untuk beristirahat di rumah.
4. Faktor jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa karena di desa Sukoharjo II laki-laki masih dianggap sebagai pemimpin dan penentu keputusan dalam lingkungan desa. Hal ini yang menyebabkan perempuan merasa kurang memiliki akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam forum-forum diskusi terkait dana desa.
5. Faktor kepemimpinan pemerintah desa memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa karena masyarakat menilai aparat desa kurang memberikan motivasi kepada masyarakat pada umumnya, karena sosialisasinya juga kurang kepada masyarakat kalangan menengah bawah namun pemerintah desa baik dari kepala desa, BPD, dan LPMD telah melaksanakan tanggung jawab yang baik dalam mengambil setiap keputusan pada pengelolaan dana desa. Kepala desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa melalui lembaga LPMD dan BPD.
6. Faktor tingkat komunikasi memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa karena masyarakat merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa ketika mereka memiliki informasi yang jelas dan lengkap mengenai alokasi dana, program-program yang akan dilaksanakan, dan dampak yang diharapkan. Komunikasi yang efektif membuat masyarakat lebih memahami kebijakan dan tujuan dari pengelolaan dana desa, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut serta.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keenam faktor tersebut, Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yaitu faktor usia sebanyak 52,08%, faktor tingkat pendidikan sebanyak 46,87%, faktor pekerjaan sebanyak 59,37%, faktor jenis kelamin sebanyak 47,91%, faktor kepemimpinan pemerintah desa sebanyak 43,75% dan faktor komunikasi sebanyak 53,12%. Dengan data tersebut dapat diketahui faktor yang paling mendominasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah faktor pekerjaan. Dimana 59,37% masyarakat Sukoharjo II yang bekerja memiliki potensi menjadi hambatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan aktif mengikuti pertemuan dan hadir pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa. Pertemuan ini merupakan kesempatan untuk mendapatkan informasi terbaru, memberikan masukan, dan mendiskusikan program-program yang akan dilaksanakan. Dengan aktif mengikuti pertemuan, diharapkan dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan terkait dana desa.

2. Bagi Aparatur Desa

Bagi aparatur desa diharapkan dapat mengadakan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan dana desa, hak dan kewajiban mereka, serta dampak positif dari partisipasi dalam pembangunan desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi lebih mendalam dengan menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, atau studi kasus pada desa yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2015). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Abu Huraerah. (2018). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, Bandung : Humaniora.
- Adha, M. M. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan Mengoptimalkan Pemahaman Perbedaan Budaya Warga Masyarakat Indonesia dalam Kajian Manifestasi Pluralisme di Era Globalisasi*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 14(2): 1-10.
- Adha, M. M. (2019). *Pendidikan Moral pada Aktivitas Kesukarelaan Warga Negara Muda (Koherensi Sikap Kepedulian dan Kerjasama Individu)*. Jurnal Of Moraland Civic Education, 3(1): 28-37.
- Arna Suryani. (2019). *Manajemen Pengelolaan Dana Desa*. J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains).
- Andrew E. Sikula. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Erlangga.
- Ara Lili, Marselina. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagen Karya, Kecamatan Lumar*. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura.
- Baum, Howell .S .(2015). *Citizen participation*. University of Maryland, College Park, USA.
- Beratha, I Nyoman. (1982). *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintarto R. (2007). *Interaksi Desa-Kota*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Budiati, Atik Catur. (2009). *Sosiologi Kontekstual X untuk SMA dan MA*. Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional.

- Cohen, J. and Uphoff, N. (1977). *Rural Development Participation Concept and Measure for Project Design Implementation and Evaluation*. New York: Cornell University. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/37882394_Rural_development_participation_concepts_and_measures_for_project_design_implementation_and_evaluation
- Chaizi, Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo.
- Darmi, T. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 89-98.
- Dunn, N. William. (1997). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- George Terry. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Gunawan, A. H. (2000). *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Berbagai Problem Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hetifah Sj. Sumarto. (2004). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kemenkeu.
- Jim ife dan Frank Tesoriero. (2016). *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Juliantara, D. (2002). *Menggeser pembangunan, memperkuat rakyat*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Miles, M. &. (2014). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- N.Daldjoen. (2011). *Interaksi Desa - Kota*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. (2003). *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Paul H. Landis. (2007). *Tata Desa*. Bandung: Mandar Maju.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 Ayat (15)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dalam Pasal 5 Ayat (2)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Purnomo, J. (2016). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- RH Unang Suenarjo. (1984). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung, Tarsito.
- Rifhi Siddiq. (2014). *Antropologi Sosial*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. (2002) . *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Saharuddin. (2019). *Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di DesaBonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 58-64.
- Slamet. (2003). *Membentuk Pola Pikir Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB. Press.

Soetomo. (2008), *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
Yogyakarta

Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.

Sunarti. (2003). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Secara Kelompok*. Jurnal Tata Loka.

Tim Redaksi Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Wasistiono, S. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wilcox, David 1994, *The Guide to Effective Participation*. London : Delta Press